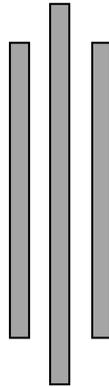




# **RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Ngurah Rai No. 01, Telp. (0362) 3306194 Singaraja

Web Site : [www.polpp.bulelengkab.go.id](http://www.polpp.bulelengkab.go.id), Email : [polpp@bulelengkab.go.id](mailto:polpp@bulelengkab.go.id)



## ***KATA PENGANTAR***

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan, Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan dokumen ini diharapkan agar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang



## *Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023*

transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 26 Oktober 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Buleleng,

**I Gede Arya Suardana, AP.MM**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19740323 199311 1 001



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng  
Tahun 2023*

**DAFTAR ISI**

	<i>Halaman</i>
<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	iii
<b>BAB I    Pendahuluan</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Struktur Organisasi SatPolPP Kabupaten Buleleng .....	2
1.3. Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja .....	5
<b>BAB II   Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja</b> .....	6
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	6
2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama.....	7
<b>BAB III   Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan</b> .....	9
<b>BAB IV   Penutup</b> .....	9
Lampiran Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan SatPolPP Kabupaten Buleleng Tahun 2023	



# *Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023*

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Satuan Polisi Pamong Praja juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja sebagai komitmen Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka



## *Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023*

mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

### **1.2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng bersama dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
  - a. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :



## *Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023*

1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Perencanaan
- b. Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah terdiri dari :
  1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan
  2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
- c. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari:
  1. Seksi Pelatihan Dasar
  2. Seksi Tekhnis Fungsional
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
  1. Seksi Bina Potensi Masyarakat
  2. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
- e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari:
  1. Seksi Operasi dan Pengendalian
  2. Seksi Kerjasama, Keamanan dan Ketertiban

### **1.3. Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja**

Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja sebagaimana yang



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng  
Tahun 2023*

diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



## **BAB II**

### **RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu *“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Buleleng yang tentram, aman, tertib dan taat kepada hukum”* dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor- faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).



## *Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023*

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

### **2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama**

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi



## *Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023*

tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja utama, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2023 sebagai Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja)



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng  
Tahun 2023*

### BAB III

### PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat mempunyai 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari 3 kegiatan dan 12 Sub Kegiatan. Pada tahun anggaran perubahan 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 13.613.021.143,- yang diuraikan sebagai berikut :

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA	
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.05.01	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 10.290.528.188,-	100%
1.05.01.2.01	1.1 Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen Anggaran, Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Baik Dan Akuntabel	Rp. 49.212.960,-	100%
1.05.01.2.01.01	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 39.462.960,-	3 Dokumen
1.05.01.2.01.06	1.1.2 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 9.750.000,-	12 Laporan



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng  
Tahun 2023*

<b>1.05.01.2.02</b>		<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan Layanan Administrasi Keuangan yang Sesuai Dengan Ketentuan</b>	<b>Rp. 8.310.815.565,-</b>	<b>100%</b>
1.05.01.2.02.01		1.2.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 8.173.678.625,-	68 Orang
1.05.01.2.02.03		1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 85.540.180,-	12 Dokumen
1.05.01.2.02.05		1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 51.596.760,-	12 Laporan
<b>1.05.01.2.05</b>		<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan Pendataan dan Pengelolaan Kepegawaian Yang Baik</b>	<b>Rp. 244.488.880,-</b>	<b>100%</b>
1.05.01.2.05.02		1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 158.200.000,-	2 Paket
1.05.01.2.05.03		1.3.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 86.288.880,-	12 Dokumen
<b>1.05.01.2.06</b>		<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Pelayanan Administrasi Umum Dan Perkantoran Yang Baik Dan Sesuai Standar</b>	<b>Rp. 318.164.610,-</b>	<b>100%</b>
1.05.01.2.06.01		1.4.1	Penyediaan	Jumlah Paket	Rp. 4.083.000,-	1 Paket



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng  
Tahun 2023*

			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan		
1.05.01.2.06.04		1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Rp. 276.023.944,-	10 Paket
1.05.01.2.06.09		1.4.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 38.057.666,-	12 Laporan
<b>1.05.01.2.06.09</b>		<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kegiatan Yang Berkualitas Baik</b>	<b>Rp. 131.868.000,-</b>	<b>100%</b>
1.05.01.2.07.05		1.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Rp. 39.849.000,-	3 Paket
1.05.01.2.07.06		1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Rp. 92.019.000,-	8 Unit
<b>1.05.01.2.08</b>		<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Berkualitas Baik</b>	<b>Rp. 591.608.113,-</b>	<b>100%</b>
1.05.01.2.08.01		1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 59.630.179,-	12 Laporan
1.05.01.2.08.02		1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Rp. 75.300.000,-	12 Laporan
1.05.01.2.08.03		1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Rp. 252.075.000,-	12 Laporan



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng  
Tahun 2023*

1.05.01.2.08.04		1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Rp. 204.602.934,-	12 Laporan
<b>1.05.01.2.09</b>		<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dengan Baik</b>	<b>Rp. 644.370.060,-</b>	<b>100%</b>
1.05.01.2.09.01		1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	Rp. 334.560.000,-	36 Unit
1.05.01.2.09.02		1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	Rp. 15.000.000,-	56 Unit
1.05.01.2.09.06		1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Rp. 30.524.138,-	44 Unit
1.05.01.2.09.09		1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp. 264.285.922,-	4 Unit
<b>1.05.02</b>	<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)</b>	<b>Rp. 3.322.492.955,-</b>	<b>100%</b>	



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng  
Tahun 2023*

1.05.02.2.01	1.1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelaksanaan Ketertiban, Ketentraman Dan Keindahan Di Masyarakat	Rp. 2.954.251.275,-	100%
1.05.02.2.01.01	1.1.1	Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dicegah Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan	Rp. 830.914.720,-	24 Kasus
1.05.02.2.01.02	1.1.2	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Masa Yang Dilakukan Penindakan	Rp. 1.079.630.920,-	24 Kasus
1.05.02.2.01.03	1.1.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 40.658.800,-	12 Dokumen
1.05.02.2.01.04	1.1.4	Pemberdayaan Perlindungan	Jumlah Dokumen Yang Memuat Hasil	Rp. 73.651.840,-	12 Dokumen



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng  
Tahun 2023*

		Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman Dan Ketertiban Umum		
1.05.02.2.01.05	1.1.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Rp. 91.362.868,-	279 Orang
1.05.02.2.01.06	1.1.6	Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Rp. 671.664.107,-	12 Dokumen
1.05.02.2.01.08	1.1.7	Penyusunan SOP Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Yang Telah Dibuat Dan Dimuktahirkan	Rp. 118.228.600,-	1 Dokumen
1.05.02.2.01.09	1.1.8	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda Dan Perkada Yang Terlayani	Rp. 48.139.420,-	12 Laporan
1.05.02.2.02	1.2	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada Yang Sesuai Dengan Ketentuan</b>	<b>Rp. 290.464.840,-</b>	<b>100%</b>



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng  
Tahun 2023*

1.05.01.2.06.01		1.2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Rp. 142.033.580,-	12 Laporan
1.05.01.2.06.04		1.2.2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 71.643.300,-	12 Laporan
1.05.01.2.06.09		1.2.3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur Yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Rp. 76.787.960,-	12 Laporan
<b>1.05.02.2.03</b>		<b>1.3</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota Yang Kompeten</b>	<b>Rp. 77.776.840,-</b>	<b>100%</b>
1.05.02.2.03.01		1.3.1	Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Rp. 77.776.840,-	12 Laporan



## *Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2023*

### **BAB IV PENUTUP**

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng ini merupakan tindak lanjut tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian rencana aksi terhadap perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan demikian Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng  
Tahun 2023*

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Buleleng atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 26 Oktober 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Buleleng,

**I Gede Arya Suardana, AP.MM**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19740323 199311 1 001

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Program	Anggaran (Rp)			
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target		Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ESELON II</b>											
<b>KASAT</b>											
1	Terwujudnya Rasa Aman Dan Nyaman Masyarakat	1	Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum)	%	100.00	Januari	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 3,536,103,181	Januari	Rp 24,388,532	KASAT
						Februari			Februari	Rp 266,024,208	
						Maret			Maret	Rp 532,048,416	
						April			April	Rp 798,072,624	
						Mei			Mei	Rp 1,074,096,832	
						Juni			Juni	Rp 1,340,121,040	
						Juli			Juli	Rp 1,906,024,208	
						Agustus			Agustus	Rp 2,172,048,416	
						September			September	Rp 2,438,072,624	
						Oktober		Rp 3,322,492,955	Oktober	Rp 2,704,096,832	
						November			November	Rp 2,970,121,040	
						Desember	100.00		Desember	Rp 3,322,492,955	
		2	Jumlah Laporan Penanganan Pelanggaran Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum)	Laporan	12.00	Januari					
						Februari					
						Maret					
						April					
						Mei					
						Juni					
						Juli					
						Agustus					
						September					
						Oktober					

						November	1.00					
						Desember	1.00					
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	1	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	80.00	Januari		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 10,721,253,783	Januari	602,462,059.00	
						Pebruari				Pebruari	1,564,355,427.00	
						Maret				Maret	2,526,248,795.00	
						April				April	3,488,142,163.00	
						Mei	80.00			Mei	4,450,035,531.00	
						Juni				Juni	5,411,928,899.00	
						Juli				Juli	6,373,822,267.00	
						Agustus				Agustus	7,335,715,635.00	
						September				September	8,297,609,003.00	
						Oktober			Rp 10,290,528,188	Oktober	9,259,502,371.00	
						Nopember				Nopember	10,221,395,739.00	
						Desember				Desember	10,290,528,188.00	
<b>TOTAL ANGGARAN (Rp)</b>									<b>Rp 13,613,021,143</b>		<b>Rp 13,613,021,143</b>	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Kegiatan	Anggaran (Rp)			
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target		Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**ESELON III**

**KABID PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

1	Terwujudnya Pendataan, Sarana Prasarana Dan Pemberdayaan Satgas Linmas Dan Satlinmas Desa/Kelurahan	1	Jumlah Laporan Pendataan, Sarana Prasarana Dan Pemberdayaan Satgas Linmas Dan Satlinmas Desa/Kelurahan Yang Valid	Laporan	12.00	Januari	1.00	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 205,673,508	Januari	Rp 1,137,420	KABID LINMAS
						Pebruari	1.00			Pebruari	Rp 18,697,591	
						Maret	1.00			Maret	Rp 37,395,182	
						April	1.00			April	Rp 56,092,773	
						Mei	1.00			Mei	Rp 74,790,364	
						Juni	1.00			Juni	Rp 93,487,955	
						Juli	1.00			Juli	Rp 112,185,546	
						Agustus	1.00			Agustus	Rp 130,883,137	
						September	1.00			September	Rp 149,580,728	

						Oktober	1.00			Oktober	Rp	168,278,319		
						Nopember	1.00			Nopember	Rp	186,975,910		
						Desember	1.00			Desember	Rp	205,673,508		
		2	Persentase Satgas Linmas Dan Satlinmas Yang Kompeten	%	100.00	Januari								
						Pebruari								
						Maret								
						April								
						Mei								
						Juni								
						Juli								
						Agustus								
						September								
						Oktober								
						Nopember								
						Desember	100.00							
TOTAL ANGGARAN (Rp)											Rp	205,673,508	Rp	205,673,508
<b>Kinerja</b>														
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Output							
1	2	3	4	5	6	7	8							
<b>FUNGSIONAL</b>														
<b>FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA AHLI</b>														
1	Terlaksananya Patroli, Pengamanan, Pengawasan, Pendataan Dan Pelatihan Linmas	1	Jumlah Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan	Laporan	12.00	Januari	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan						
						Februari	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan						
						Maret	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan						
						April	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan						
						Mei	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan						
						Juni	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan						
						Juli	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan						

						Agustus	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						September	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Oktober	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						November	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Desember	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
		2	Jumlah Laporan Pendataan Linmas Aktif Dan Non Aktif	Laporan	3.00	Januari		
						Februari		
						Maret	1.00	Laporan Pendataan Linmas Aktif Dan Non Aktif
						April		
						Mei	1.00	Laporan Pendataan Linmas Aktif Dan Non Aktif
						Juni		
						Juli		
						Agustus	1.00	Laporan Pendataan Linmas Aktif Dan Non Aktif
						September		
						Oktober		
						November		
						Desember		
		3	Jumlah Laporan Pelatihan Linmas	Laporan	1.00	Januari		
						Februari		
						Maret		
						April		
						Mei		
						Juni		
						Juli		
						Agustus		
						September		
						Oktober	1.00	Laporan Pelatihan Linmas
						November		
						Desember		
2	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Dan Pemantauan Penegakan Perda Dan Perkada	1	Jumlah Laporan Koordinasi, Pelaksanaan Dan Pemantauan Penegakan Perda Dan Perkada	Laporan	2.00	Januari	1.00	Laporan Koordinasi, Pelaksanaan Dan Pemantauan Penegakan Perda Dan Perkada
						Februari		
						Maret		

						April		
						Mei		
						Juni		
						Juli		
						Agustus		
						September		
						Oktober		
						November	1.00	Laporan Koordinasi, Pelaksanaan Dan Pemantauan Penegakan Perda Dan Perkada
						Desember		
			Jumlah Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada	Laporan	12.00	Januari	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Februari	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Maret	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						April	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Mei	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Juni	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Juli	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Agustus	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						September	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Oktober	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						November	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Desember	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
<b>FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL</b>								
1	Terlaksananya Patroli, Pengamanan, Pengawasan, Pendataan Dan Pelatihan Linmas	1	Jumlah Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan	Laporan	12.00	Januari	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Februari	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Maret	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						April	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Mei	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Juni	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Juli	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Agustus	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						September	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Oktober	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						November	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan

					Desember	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan	
		2	Jumlah Laporan Pendataan Linmas Aktif Dan Non Aktif	Laporan	3.00	Januari		
					Februari			
					Maret	1.00	Laporan Pendataan Linmas Aktif Dan Non Aktif	
					April			
					Mei	1.00	Laporan Pendataan Linmas Aktif Dan Non Aktif	
					Juni			
					Juli			
					Agustus	1.00	Laporan Pendataan Linmas Aktif Dan Non Aktif	
					September			
					Oktober			
					November			
					Desember			
		3	Jumlah Laporan Pelatihan Linmas	Laporan	1.00	Januari		
					Februari			
					Maret			
					April			
					Mei			
					Juni			
					Juli			
					Agustus			
					September			
					Oktober	1.00	Laporan Pelatihan Linmas	
					November			
					Desember			
2	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Dan Pemantauan Penegakan Perda Dan Perkada	1	Jumlah Laporan Koordinasi, Pelaksanaan Dan Pemantauan Penegakan Perda Dan Perkada	Laporan	2.00	Januari	1.00	Laporan Koordinasi, Pelaksanaan Dan Pemantauan Penegakan Perda Dan Perkada
					Februari			
					Maret			
					April			
					Mei			
					Juni			
					Juli			
					Agustus			
					September			

						Oktober		
						November	1.00	Laporan Koordinasi, Pelaksanaan Dan Pemantauan Penegakan Perda Dan Perkada
						Desember		
			Jumlah Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada	Laporan	12.00	Januari	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Februari	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Maret	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						April	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Mei	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Juni	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Juli	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Agustus	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						September	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Oktober	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						November	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Desember	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
<b>AHLI PERTAMA-PENGERAK SWADAYAMASYARAKAT</b>								
1	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Masyarakat	1	Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan Masyarakat	Laporan	5.00	Januari		
						Pebruari		
						Maret		
						April		
						Mei		
						Juni		
						Juli		
						Agustus	1.00	Laporan Kegiatan Penyuluhan Masyarakat
						September	1.00	Laporan Kegiatan Penyuluhan Masyarakat
						Oktober	1.00	Laporan Kegiatan Penyuluhan Masyarakat
						Nopember	1.00	Laporan Kegiatan Penyuluhan Masyarakat
						Desember	1.00	Laporan Kegiatan Penyuluhan Masyarakat
2	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Dan Pendampingan Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2	Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan Dan Pendampingan Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Laporan	5.00	Januari		
						Pebruari		

						Maret		
						April		
						Mei		
						Juni		
						Juli		
						Agustus	1.00	Laporan Kegiatan Pengawasan Dan Pendampingan Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
						September	1.00	Laporan Kegiatan Pengawasan Dan Pendampingan Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
						Oktober	1.00	Laporan Kegiatan Pengawasan Dan Pendampingan Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
						November	1.00	Laporan Kegiatan Pengawasan Dan Pendampingan Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
						Desember	1.00	Laporan Kegiatan Pengawasan Dan Pendampingan Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

**STAF**

**PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

1	Terlaksananya Pendataan Anggota Satgas Linmas Dan Satlinmas Yang Diberdayakan Dalam Pengamanan Swakarsa Dan Ketertiban Umum	1	Jumlah Laporan Pendataan Anggota Satgas Linmas Dan Satlinmas Yang Diberdayakan Dalam Pengamanan Swakarsa Dan Ketertiban Umum	Laporan	12.00	Januari	1.00	Laporan Pendataan Anggota Satgas Linmas Dan Satlinmas Yang Diberdayakan Dalam Pengamanan Swakarsa Dan Ketertiban Umum
						Februari	1.00	Laporan Pendataan Anggota Satgas Linmas Dan Satlinmas Yang Diberdayakan Dalam Pengamanan Swakarsa Dan Ketertiban Umum
						Maret	1.00	Laporan Pendataan Anggota Satgas Linmas Dan Satlinmas Yang Diberdayakan Dalam Pengamanan Swakarsa Dan Ketertiban Umum
						April	1.00	Laporan Pendataan Anggota Satgas Linmas Dan Satlinmas Yang Diberdayakan Dalam Pengamanan Swakarsa Dan Ketertiban Umum
						Mei	1.00	Laporan Pendataan Anggota Satgas Linmas Dan Satlinmas Yang Diberdayakan Dalam Pengamanan Swakarsa Dan Ketertiban Umum
						Juni	1.00	Laporan Pendataan Anggota Satgas Linmas Dan Satlinmas Yang Diberdayakan Dalam Pengamanan Swakarsa Dan Ketertiban Umum
						Juli	1.00	Laporan Pendataan Anggota Satgas Linmas Dan Satlinmas Yang Diberdayakan Dalam Pengamanan Swakarsa Dan Ketertiban Umum
						Agustus	1.00	Laporan Pendataan Anggota Satgas Linmas Dan Satlinmas Yang Diberdayakan Dalam Pengamanan Swakarsa Dan Ketertiban Umum
						September	1.00	Laporan Pendataan Anggota Satgas Linmas Dan Satlinmas Yang Diberdayakan Dalam Pengamanan Swakarsa Dan Ketertiban Umum
						Oktober	1.00	Laporan Pendataan Anggota Satgas Linmas Dan Satlinmas Yang Diberdayakan Dalam Pengamanan Swakarsa Dan Ketertiban Umum
						November	1.00	Laporan Pendataan Anggota Satgas Linmas Dan Satlinmas Yang Diberdayakan Dalam Pengamanan Swakarsa Dan Ketertiban Umum
						Desember	1.00	Laporan Pendataan Anggota Satgas Linmas Dan Satlinmas Yang Diberdayakan Dalam Pengamanan Swakarsa Dan Ketertiban Umum
					Kinerja			
					Anggaran (Rp)			

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ESELON IV</b>											
<b>KASI BINA POTENSI MASYARAKAT</b>											
1	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bermuansa Kemanusiaan Dan Hak Asasi Manusia	1	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bermuansa Kemanusiaan Dan Hak Asasi Manusia	Laporan	12.00	Januari	1.00				KASI BINA POTENSI MASYARAKAT
						Pebruari	1.00				
						Maret	1.00				
						April	1.00				
						Mei	1.00				
						Juni	1.00				
						Juli	1.00				
						Agustus	1.00				
						September	1.00				
						Oktober	1.00				
						Nopember	1.00				
						Desember	1.00				
2	Terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1	Jumlah Laporan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Laporan	12.00	Januari	1.00				
						Pebruari	1.00				
						Maret	1.00				
						April	1.00				
						Mei	1.00				
						Juni	1.00				
						Juli	1.00				
						Agustus	1.00				
						September	1.00				
						Oktober	1.00				
						Nopember	1.00				
						Desember	1.00				
<b>KASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>											



						Nopember				Nopember	Rp	2,379,439,520
						Desember	100.00			Desember	Rp	2,582,209,747
		2	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Melalui Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan, Pembinaan Dan Penyuluhan Serta Deteksi Dan Cegah Dini	Laporan	12.00	Januari	1.00					
						Februari	1.00					
						Maret	1.00					
						April	1.00					
						Mei	1.00					
						Juni	1.00					
						Juli	1.00					
						Agustus	1.00					
						September	1.00					
						Oktober	1.00					
						November	1.00					
						Desember	1.00					
		3	Persentase Penindakan Atas Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban	%	100	Januari						
						Pebruari						
						Maret						
						April						
						Mei						
						Juni						
						Juli						
						Agustus						
						September						
						Oktober						
						Nopember						
						Desember	100.00					

		4	Jumlah Laporan Penindakan Atas Gangguan Ketertarikan Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban	Laporan	12.00	Januari	1.00					
						Februari	1.00					
						Maret	1.00					
						April	1.00					
						Mei	1.00					
						Juni	1.00					
						Juli	1.00					
						Agustus	1.00					
						September	1.00					
						Oktober	1.00					
						November	1.00					
						Desember	1.00					
		5	Jumlah Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketertarikan Dan Ketertiban Umum	Laporan	12.00	Januari	1.00					
						Februari	1.00					
						Maret	1.00					
						April	1.00					
						Mei	1.00					
						Juni	1.00					
						Juli	1.00					
						Agustus	1.00					
						September	1.00					
						Oktober	1.00					
						November	1.00					
						Desember	1.00					
TOTAL ANGGARAN (Rp)									Rp	2,582,209,747	Rp	2,582,209,747
Kinerja												
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Output					
1	2	3	4	5	6	7	8					
<b>FUNGSIONAL</b>												
<b>FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA AHLI</b>												

1	Terlaksananya Patroli, Pengamanan, Pengawasan, Pendataan Dan Pelatihan Linmas	1	Jumlah Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan	Laporan	12.00	Januari	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Februari	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Maret	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						April	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Mei	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Juni	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Juli	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Agustus	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						September	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Oktober	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						November	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Desember	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
		2	Jumlah Laporan Pendataan Linmas Aktif Dan Non Aktif	Laporan	3.00	Januari		
						Februari		
						Maret	1.00	Laporan Pendataan Linmas Aktif Dan Non Aktif
						April		
						Mei	1.00	Laporan Pendataan Linmas Aktif Dan Non Aktif
						Juni		
						Juli		
						Agustus	1.00	Laporan Pendataan Linmas Aktif Dan Non Aktif
						September		
						Oktober		
						November		
						Desember		
		3	Jumlah Laporan Pelatihan Linmas	Laporan	1.00	Januari		
						Februari		
						Maret		
						April		
						Mei		
						Juni		
						Juli		
						Agustus		

						September		
						Oktober	1.00	Laporan Pelatihan Linmas
						November		
						Desember		
2	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Dan Pemantauan Penegakan Perda Dan Perkada	1	Jumlah Laporan Koordinasi, Pelaksanaan Dan Pemantauan Penegakan Perda Dan Perkada	Laporan	2.00	Januari	1.00	Laporan Koordinasi, Pelaksanaan Dan Pemantauan Penegakan Perda Dan Perkada
						Februari		
						Maret		
						April		
						Mei		
						Juni		
						Juli		
						Agustus		
						September		
						Oktober		
						November	1.00	Laporan Koordinasi, Pelaksanaan Dan Pemantauan Penegakan Perda Dan Perkada
						Desember		
			Jumlah Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada	Laporan	12.00	Januari	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Februari	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Maret	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						April	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Mei	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Juni	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Juli	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Agustus	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						September	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Oktober	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						November	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Desember	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada

**FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL**

1	Terlaksananya Patroli, Pengamanan, Pengawasan, Pendataan Dan Pelatihan Linmas	1	Jumlah Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan	Laporan	12.00	Januari	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Februari	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Maret	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						April	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Mei	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Juni	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Juli	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Agustus	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						September	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Oktober	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						November	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Desember	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
		2	Jumlah Laporan Pendataan Linmas Aktif Dan Non Aktif	Laporan	3.00	Januari		
						Februari		
						Maret	1.00	Laporan Pendataan Linmas Aktif Dan Non Aktif
						April		
						Mei	1.00	Laporan Pendataan Linmas Aktif Dan Non Aktif
						Juni		
						Juli		
						Agustus	1.00	Laporan Pendataan Linmas Aktif Dan Non Aktif
						September		
						Oktober		
						November		
						Desember		
		3	Jumlah Laporan Pelatihan Linmas	Laporan	1.00	Januari		
						Februari		
						Maret		
						April		
						Mei		
						Juni		
						Juli		
						Agustus		
						September		

						Oktober	1.00	Laporan Pelatihan Linmas
						November		
						Desember		
2	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Dan Pemantauan Penegakan Perda Dan Perkada	1	Jumlah Laporan Koordinasi, Pelaksanaan Dan Pemantauan Penegakan Perda Dan Perkada	Laporan	2.00	Januari	1.00	Laporan Koordinasi, Pelaksanaan Dan Pemantauan Penegakan Perda Dan Perkada
						Februari		
						Maret		
						April		
						Mei		
						Juni		
						Juli		
						Agustus		
						September		
						Oktober		
						November	1.00	Laporan Koordinasi, Pelaksanaan Dan Pemantauan Penegakan Perda Dan Perkada
						Desember		
			Jumlah Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada	Laporan	12.00	Januari	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Februari	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Maret	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						April	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Mei	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Juni	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Juli	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Agustus	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						September	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Oktober	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						November	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
						Desember	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
<b>AHLI PERTAMA-PENGERAK SWADAYAMASYARAKAT</b>								
1	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Masyarakat	1	Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan Masyarakat	Laporan	5.00	Januari		
						Pebruari		

						Maret		
						April		
						Mei		
						Juni		
						Juli		
						Agustus	1.00	Laporan Kegiatan Penyuluhan Masyarakat
						September	1.00	Laporan Kegiatan Penyuluhan Masyarakat
						Oktober	1.00	Laporan Kegiatan Penyuluhan Masyarakat
						Nopember	1.00	Laporan Kegiatan Penyuluhan Masyarakat
						Desember	1.00	Laporan Kegiatan Penyuluhan Masyarakat
2	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Dan Pendampingan Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2	Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan Dan Pendampingan Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Laporan	5.00	Januari		
						Pebruari		
						Maret		
						April		
						Mei		
						Juni		
						Juli		
						Agustus	1.00	Laporan Kegiatan Pengawasan Dan Pendampingan Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
						September	1.00	Laporan Kegiatan Pengawasan Dan Pendampingan Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
						Oktober	1.00	Laporan Kegiatan Pengawasan Dan Pendampingan Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
						Nopember	1.00	Laporan Kegiatan Pengawasan Dan Pendampingan Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
						Desember	1.00	Laporan Kegiatan Pengawasan Dan Pendampingan Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
<b>STAF</b>								
<b>PETUGAS PENGEJARAN DAN PATROLI</b>								
1	Terlaksananya Patroli Ketertiban Umum Masyarakat	1	Jumlah Laporan Patroli Ketertiban Umum Masyarakat	Laporan	12.00	Januari	1.00	Laporan Pengawasan, Pembinaan Dan Penertiban PKL, Gepeng, Spanduk, Baliho, Banner Yang Melanggar Peraturan Daerah Di Kabupaten Buleleng
						Februari	1.00	Laporan Pengawasan, Pembinaan Dan Penertiban PKL, Gepeng, Spanduk, Baliho, Banner Yang Melanggar Peraturan Daerah Di Kabupaten Buleleng
						Maret	1.00	Laporan Pengawasan, Pembinaan Dan Penertiban PKL, Gepeng, Spanduk, Baliho, Banner Yang Melanggar Peraturan Daerah Di Kabupaten Buleleng
						April	1.00	Laporan Pengawasan, Pembinaan Dan Penertiban PKL, Gepeng, Spanduk, Baliho, Banner Yang Melanggar Peraturan Daerah Di Kabupaten Buleleng
						Mei	1.00	Laporan Pengawasan, Pembinaan Dan Penertiban PKL, Gepeng, Spanduk, Baliho, Banner Yang Melanggar Peraturan Daerah Di Kabupaten Buleleng
						Juni	1.00	Laporan Pengawasan, Pembinaan Dan Penertiban PKL, Gepeng, Spanduk, Baliho, Banner Yang Melanggar Peraturan Daerah Di Kabupaten Buleleng

						Juli	1.00	Laporan Pengawasan, Pembinaan Dan Penertiban PKL, Gepeng, Spanduk, Baliho, Banner Yang Melanggar Peraturan Daerah Di Kabupaten Buleleng
						Agustus	1.00	Laporan Pengawasan, Pembinaan Dan Penertiban PKL, Gepeng, Spanduk, Baliho, Banner Yang Melanggar Peraturan Daerah Di Kabupaten Buleleng
						September	1.00	Laporan Pengawasan, Pembinaan Dan Penertiban PKL, Gepeng, Spanduk, Baliho, Banner Yang Melanggar Peraturan Daerah Di Kabupaten Buleleng
						Oktober	1.00	Laporan Pengawasan, Pembinaan Dan Penertiban PKL, Gepeng, Spanduk, Baliho, Banner Yang Melanggar Peraturan Daerah Di Kabupaten Buleleng
						November	1.00	Laporan Pengawasan, Pembinaan Dan Penertiban PKL, Gepeng, Spanduk, Baliho, Banner Yang Melanggar Peraturan Daerah Di Kabupaten Buleleng
						Desember	1.00	Laporan Pengawasan, Pembinaan Dan Penertiban PKL, Gepeng, Spanduk, Baliho, Banner Yang Melanggar Peraturan Daerah Di Kabupaten Buleleng

**PENGADMINISTRASI UMUM**

1	Tersedianya Laporan Administrasi Bidang Ketertiban Umum	1	Jumlah Laporan Administrasi Bidang Ketertiban Umum	Laporan	12.00	Januari	1.00	Laporan Kegiatan Bidang Trantib Dan Jumlah Laporan SPJ Bidang Trantib
						Februari	1.00	Laporan Kegiatan Bidang Trantib Dan Jumlah Laporan SPJ Bidang Trantib
						Maret	1.00	Laporan Kegiatan Bidang Trantib Dan Jumlah Laporan SPJ Bidang Trantib
						April	1.00	Laporan Kegiatan Bidang Trantib Dan Jumlah Laporan SPJ Bidang Trantib
						Mei	1.00	Laporan Kegiatan Bidang Trantib Dan Jumlah Laporan SPJ Bidang Trantib
						Juni	1.00	Laporan Kegiatan Bidang Trantib Dan Jumlah Laporan SPJ Bidang Trantib
						Juli	1.00	Laporan Kegiatan Bidang Trantib Dan Jumlah Laporan SPJ Bidang Trantib
						Agustus	1.00	Laporan Kegiatan Bidang Trantib Dan Jumlah Laporan SPJ Bidang Trantib
						September	1.00	Laporan Kegiatan Bidang Trantib Dan Jumlah Laporan SPJ Bidang Trantib
						Oktober	1.00	Laporan Kegiatan Bidang Trantib Dan Jumlah Laporan SPJ Bidang Trantib
						November	1.00	Laporan Kegiatan Bidang Trantib Dan Jumlah Laporan SPJ Bidang Trantib
						Desember	1.00	Laporan Kegiatan Bidang Trantib Dan Jumlah Laporan SPJ Bidang Trantib

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Keterangan
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target		Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**ESELON IV**

**KASI KERJASAMA, KEAMANAN DAN KETERTIBAN**



No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ESELON IV</b>											
<b>KASI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN</b>											
1	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan	1	Jumlah Laporan Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan	Laporan	12.00	Januari	1.00				
						Februari	1.00				
						Maret	1.00				
						April	1.00				
						Mei	1.00				
						Juni	1.00				
						Juli	1.00				
						Agustus	1.00				
						September	1.00				
						Oktober	1.00				
						November	1.00				
						Desember	1.00				
2	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban	1	Jumlah Laporan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban	Laporan	12.00	Januari	1.00				
						Februari	1.00				
						Maret	1.00				
						April	1.00				
						Mei	1.00				
						Juni	1.00				
						Juli	1.00				
						Agustus	1.00				
						September	1.00				
						Oktober	1.00				
						November	1.00				
						Desember	1.00				

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja				Output
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target		
				5	6	7	8	
<b>STAF</b>								
<b>KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN</b>								
1	Terlaksananya Penangkapan Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penangkapan Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Yang Dikoordinir	Laporan	12.00	Januari	1.00	Laporan Pelaksanaan Penangkapan Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Perda Kabupaten Buleleng, Laporan Pengawasan, Pembinaan Dan Penerbitan PKL, Baliho, Spanduk Banner Yang Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Dan Pengamanan Hari-hari Besar Nasional	
					Februari	1.00	Laporan Pelaksanaan Penangkapan Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Perda Kabupaten Buleleng, Laporan Pengawasan, Pembinaan Dan Penerbitan PKL, Baliho, Spanduk Banner Yang Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Dan Pengamanan Hari-hari Besar Nasional	
					Maret	1.00	Laporan Pelaksanaan Penangkapan Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Perda Kabupaten Buleleng, Laporan Pengawasan, Pembinaan Dan Penerbitan PKL, Baliho, Spanduk Banner Yang Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Dan Pengamanan Hari-hari Besar Nasional	
					April	1.00	Laporan Pelaksanaan Penangkapan Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Perda Kabupaten Buleleng, Laporan Pengawasan, Pembinaan Dan Penerbitan PKL, Baliho, Spanduk Banner Yang Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Dan Pengamanan Hari-hari Besar Nasional	
					Mei	1.00	Laporan Pelaksanaan Penangkapan Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Perda Kabupaten Buleleng, Laporan Pengawasan, Pembinaan Dan Penerbitan PKL, Baliho, Spanduk Banner Yang Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Dan Pengamanan Hari-hari Besar Nasional	
					Juni	1.00	Laporan Pelaksanaan Penangkapan Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Perda Kabupaten Buleleng, Laporan Pengawasan, Pembinaan Dan Penerbitan PKL, Baliho, Spanduk Banner Yang Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Dan Pengamanan Hari-hari Besar Nasional	
					Juli	1.00	Laporan Pelaksanaan Penangkapan Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Perda Kabupaten Buleleng, Laporan Pengawasan, Pembinaan Dan Penerbitan PKL, Baliho, Spanduk Banner Yang Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Dan Pengamanan Hari-hari Besar Nasional	
					Agustus	1.00	Laporan Pelaksanaan Penangkapan Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Perda Kabupaten Buleleng, Laporan Pengawasan, Pembinaan Dan Penerbitan PKL, Baliho, Spanduk Banner Yang Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Dan Pengamanan Hari-hari Besar Nasional	
					September	1.00	Laporan Pelaksanaan Penangkapan Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Perda Kabupaten Buleleng, Laporan Pengawasan, Pembinaan Dan Penerbitan PKL, Baliho, Spanduk Banner Yang Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Dan Pengamanan Hari-hari Besar Nasional	
					Oktober	1.00	Laporan Pelaksanaan Penangkapan Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Perda Kabupaten Buleleng, Laporan Pengawasan, Pembinaan Dan Penerbitan PKL, Baliho, Spanduk Banner Yang Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Dan Pengamanan Hari-hari Besar Nasional	
					November	1.00	Laporan Pelaksanaan Penangkapan Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Perda Kabupaten Buleleng, Laporan Pengawasan, Pembinaan Dan Penerbitan PKL, Baliho, Spanduk Banner Yang Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Dan Pengamanan Hari-hari Besar Nasional	

						Desember	1.00	Laporan Pelaksanaan Penangkapan Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Perda Kabupaten Buleleng, Laporan Pengawasan, Pembinaan Dan Penerbitan PKL, Baliho, Spanduk Banner Yang Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Dan Pengamanan Hari-hari Besar Nasional
<b>PRANATA PASUKAN PENGAMANAN DALAM</b>								
1	Terlaksananya Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Rumah Jabatan Bupati	Jumlah Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Rumah Jabatan Bupati	Laporan	12.00	Januari	1.00		Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pejabat Daerah (Di Rumah Jabatan Bupati)
					Februari	1.00		Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pejabat Daerah (Di Rumah Jabatan Bupati)
					Maret	1.00		Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pejabat Daerah (Di Rumah Jabatan Bupati)
					April	1.00		Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pejabat Daerah (Di Rumah Jabatan Bupati)
					Mei	1.00		Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pejabat Daerah (Di Rumah Jabatan Bupati)
					Juni	1.00		Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pejabat Daerah (Di Rumah Jabatan Bupati)
					Juli	1.00		Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pejabat Daerah (Di Rumah Jabatan Bupati)
					Agustus	1.00		Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pejabat Daerah (Di Rumah Jabatan Bupati)
					September	1.00		Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pejabat Daerah (Di Rumah Jabatan Bupati)
					Oktober	1.00		Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pejabat Daerah (Di Rumah Jabatan Bupati)
					November	1.00		Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pejabat Daerah (Di Rumah Jabatan Bupati)
					Desember	1.00		Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pejabat Daerah (Di Rumah Jabatan Bupati)
	Terlaksananya Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor Bupati	Jumlah Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor Bupati	Laporan	12.00	Januari	1.00		Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor Bupati
					Februari	1.00		Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor Bupati
					Maret	1.00		Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor Bupati

					April	1.00	Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor Bupati
					Mei	1.00	Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor Bupati
					Juni	1.00	Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor Bupati
					Juli	1.00	Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor Bupati
					Agustus	1.00	Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor Bupati
					September	1.00	Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor Bupati
					Oktober	1.00	Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor Bupati
					November	1.00	Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor Bupati
					Desember	1.00	Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor Bupati
	Terlaksananya Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor SatPolPP	Jumlah Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor SatPolPP	Laporan	12.00	Januari	1.00	Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor SatPolPP
					Februari	1.00	Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor SatPolPP
					Maret	1.00	Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor SatPolPP
					April	1.00	Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor SatPolPP
					Mei	1.00	Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor SatPolPP
					Juni	1.00	Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor SatPolPP
					Juli	1.00	Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor SatPolPP
					Agustus	1.00	Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor SatPolPP
					September	1.00	Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor SatPolPP
					Oktober	1.00	Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor SatPolPP
					November	1.00	Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor SatPolPP
					Desember	1.00	Laporan Pengamanan Dan Penjagaan Operasional Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kantor SatPolPP
	Terlaksananya Patwal Dan Pengamanan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tamu Negara	Jumlah Laporan Patwal Dan Pengamanan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tamu Negara	Laporan	12.00	Januari	1.00	Laporan Pengawasan Dan Pengamanan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tamu Negara
					Februari	1.00	Laporan Pengawasan Dan Pengamanan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tamu Negara
					Maret	1.00	Laporan Pengawasan Dan Pengamanan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tamu Negara
					April	1.00	Laporan Pengawasan Dan Pengamanan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tamu Negara





						Desember	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
		2	Jumlah Laporan Pendataan Linmas Aktif Dan Non Aktif	Laporan	3.00	Januari		
						Februari		
						Maret	1.00	Laporan Pendataan Linmas Aktif Dan Non Aktif
						April		
						Mei	1.00	Laporan Pendataan Linmas Aktif Dan Non Aktif
						Juni		
						Juli		
						Agustus	1.00	Laporan Pendataan Linmas Aktif Dan Non Aktif
						September		
						Oktober		
						November		
						Desember		
		3	Jumlah Laporan Pelatihan Linmas	Laporan	1.00	Januari		
						Februari		
						Maret		
						April		
						Mei		
						Juni		
						Juli		
						Agustus		
						September		
						Oktober	1.00	Laporan Pelatihan Linmas
						November		
						Desember		
2	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Dan Pemantauan Penegakan Perda Dan Perkada	1	Jumlah Laporan Koordinasi, Pelaksanaan Dan Pemantauan Penegakan Perda Dan Perkada	Laporan	2.00	Januari	1.00	Laporan Koordinasi, Pelaksanaan Dan Pemantauan Penegakan Perda Dan Perkada
						Februari		
						Maret		
						April		
						Mei		
						Juni		
						Juli		
						Agustus		
						September		
						Oktober		
						November	1.00	Laporan Koordinasi, Pelaksanaan Dan Pemantauan Penegakan Perda Dan Perkada
						Desember		

		Jumlah Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada	Laporan	12.00	Januari	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
					Februari	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
					Maret	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
					April	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
					Mei	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
					Juni	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
					Juli	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
					Agustus	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
					September	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
					Oktober	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
					November	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada
					Desember	1.00	Laporan Pemantauan, Pembinaan Non Yustisi Penegakan Perda Dan Perkada

### STAF

### PENGADMINISTRASI PENGADUAN PUBLIK

1	Tersedianya Data Laporan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Data Laporan Pengaduan Masyarakat	Laporan	12.00	Januari	1.00	Data Laporan Pengaduan Masyarakat
					Februari	1.00	Data Laporan Pengaduan Masyarakat
					Maret	1.00	Data Laporan Pengaduan Masyarakat
					April	1.00	Data Laporan Pengaduan Masyarakat
					Mei	1.00	Data Laporan Pengaduan Masyarakat
					Juni	1.00	Data Laporan Pengaduan Masyarakat
					Juli	1.00	Data Laporan Pengaduan Masyarakat
					Agustus	1.00	Data Laporan Pengaduan Masyarakat
					September	1.00	Data Laporan Pengaduan Masyarakat
					Oktober	1.00	Data Laporan Pengaduan Masyarakat
					November	1.00	Data Laporan Pengaduan Masyarakat
					Desember	1.00	Data Laporan Pengaduan Masyarakat

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Keterangan
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target		Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### ESELON IV

### KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN





No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Kegiatan	Anggaran (Rp)			
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target		Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ESELON III</b>											
<b>KABID SUMBER DAYA APARATUR</b>											
1	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan	%	100.00	Januari		Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Rp 166,374,520	Januari	Rp 1,137,420	KABID SDA
					Pebruari				Pebruari	Rp 15,124,956	
					Maret				Maret	Rp 30,249,912	
					April				April	Rp 45,374,868	
					Mei				Mei	Rp 60,499,824	
					Juni				Juni	Rp 75,624,780	
					Juli				Juli	Rp 90,749,736	
					Agustus				Agustus	Rp 105,874,692	
					September				September	Rp 120,999,648	
					Oktober			Rp 166,368,020	Oktober	Rp 136,124,604	
					Nopember				Nopember	Rp 151,249,560	
					Desember	100.00			Desember	Rp 166,368,020	
		2 Jumlah Laporan Sumber Daya Aparatur Yang Terdata Mengikuti Pelatihan	Laporan	12.00	Januari	1.00					
					Februari	1.00					
					Maret	1.00					
					April	1.00					
					Mei	1.00					
					Juni	1.00					
					Juli	1.00					
					Agustus	1.00					
					September	1.00					
					Oktober	1.00					
					November	1.00					
					Desember	1.00					

2	Terfasilitasinya Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Persentase Pengembangan Kapasitas SDA Yang Difasilitasi	%	100.00	Januari		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Rp	77,776,840	Januari	Rp	458,640
						Pebruari					Pebruari	Rp	7,070,621
						Maret					Maret	Rp	14,141,242
						April					April	Rp	21,211,863
						Mei					Mei	Rp	28,282,484
						Juni					Juni	Rp	35,353,105
						Juli					Juli	Rp	42,423,726
						Agustus					Agustus	Rp	49,494,347
						September					September	Rp	56,564,968
						Oktober					Oktober	Rp	63,635,589
						Nopember					Nopember	Rp	70,706,210
						Desember	100.00				Desember	Rp	77,776,840
		2	Jumlah Laporan Pengembangan Kapasitas SDA Yang Difasilitasi	Laporan	2.00	Januari							
						Februari							
						Maret							
						April							
						Mei							
						Juni							
						Juli	1.00						
						Agustus							
						September							
						Oktober							
						November							
						Desember	1.00						
TOTAL ANGGARAN (Rp)									Rp	244,144,860		Rp	244,144,860
Kinerja													
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Output						
1	2	3	4	5	6	7	8						
<b>FUNGSIONAL</b>													
<b>FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA AHLI</b>													
1	Terlaksananya Patroli, Pengamanan, Pengawasan, Pendataan Dan Pelatihan Linmas	1	Jumlah Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan	Laporan	12.00	Januari	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan					

						Februari	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Maret	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						April	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Mei	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Juni	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Juli	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Agustus	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						September	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Oktober	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						November	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
						Desember	1.00	Laporan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
		2	Jumlah Laporan Pendataan Linmas Aktif Dan Non Aktif	Laporan	3.00	Januari		
						Februari		
						Maret	1.00	Laporan Pendataan Linmas Aktif Dan Non Aktif
						April		
						Mei	1.00	Laporan Pendataan Linmas Aktif Dan Non Aktif
						Juni		
						Juli		
						Agustus	1.00	Laporan Pendataan Linmas Aktif Dan Non Aktif
						September		
						Oktober		
						November		
						Desember		
		3	Jumlah Laporan Pelatihan Linmas	Laporan	1.00	Januari		
						Februari		
						Maret		
						April		
						Mei		
						Juni		
						Juli		
						Agustus		
						September		
						Oktober	1.00	Laporan Pelatihan Linmas
						November		
						Desember		
2	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Dan Pemantauan Penegakan Perda Dan Perkada	1	Jumlah Laporan Koordinasi, Pelaksanaan Dan Pemantauan Penegakan Perda Dan Perkada	Laporan	2.00	Januari	1.00	Laporan Koordinasi, Pelaksanaan Dan Pemantauan Penegakan Perda Dan Perkada
						Februari		



						Juli	1.00					
						Agustus	1.00					
						September	1.00					
						Oktober	1.00					
						November	1.00					
						Desember	1.00					

**KASI TEKNIS FUNGSIONAL**

1	Terlaksananya Pelatihan Dasar Dan Teknis Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng	1	Jumlah Laporan Pelatihan Dasar Dan Teknis Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Yang Kompeten	Laporan	12.00	Januari	1.00						KASI TEKNIS FUNGSIONAL
						Februari	1.00						
						Maret	1.00						
						April	1.00						
						Mei	1.00						
						Juni	1.00						
						Juli	1.00						
						Agustus	1.00						
						September	1.00						
						Oktober	1.00						
						November	1.00						
						Desember	1.00						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Kegiatan	Anggaran (Rp)			Keterangan
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target		Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**ESELON III**

**SEKRETARIS**

1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	1	Nilai AKIP yang baik	Nilai	80.00	Januari		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	49,212,960	Januari	Rp	-	SEKRETARIS
						Pebruari					Pebruari	Rp	4,473,905	
						Maret					Maret	Rp	8,947,810	
						April					April	Rp	13,421,715	
						Mei	80.00				Mei	Rp	17,895,620	

						Juni				Juni	Rp	22,369,525
						Juli				Juli	Rp	26,843,430
						Agustus				Agustus	Rp	31,317,335
						September				September	Rp	35,791,240
						Oktober				Oktober	Rp	40,265,145
						Nopember				Nopember	Rp	44,739,050
						Desember				Desember	Rp	49,212,960
		2	Persentase Penyebaran Kuisisioner Pengguna Layanan	%	100.00	Januari		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 623,975,189	Januari	Rp	35,553,350
						Pebruari				Pebruari	Rp	87,551,282
						Maret				Maret	Rp	140,532,920
						April				April	Rp	192,530,852
						Mei				Mei	Rp	244,528,784
						Juni				Juni	Rp	296,526,716
						Juli				Juli	Rp	348,524,648
						Agustus				Agustus	Rp	400,522,580
						September				September	Rp	452,520,512
						Oktober			Rp 591,608,113	Oktober	Rp	504,518,444
						Nopember				Nopember	Rp	556,516,376
						Desember	100.00			Desember	Rp	591,608,113
		3	Jumlah Laporan Penyebaran Kuisisioner Pengguna Layanan	Laporan	12.00	Januari	1.00					
						Februari	1.00					
						Maret	1.00					
						April	1.00					
						Mei	1.00					
						Juni	1.00					
						Juli	1.00					
						Agustus	1.00					
						September	1.00					

						Oktober	1.00						
						November	1.00						
						Desember	1.00						
		4	Persentase Layanan Kepegawaian Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan	%	100.00	Januari		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	970,874,004	Januari	Rp	69,222,833
						Pebruari					Pebruari	Rp	138,445,666
						Maret					Maret	Rp	207,668,499
						April					April	Rp	276,891,332
						Mei					Mei	Rp	346,114,165
						Juni					Juni	Rp	415,336,998
						Juli					Juli	Rp	484,559,831
						Agustus					Agustus	Rp	553,782,664
						September					September	Rp	623,192,972
						Oktober			Rp	1,020,726,940	Oktober	Rp	692,415,805
						Nopember					Nopember	Rp	761,638,638
						Desember	100.00				Desember	Rp	1,020,726,940
		5	Jumlah Laporan Layanan Kepegawaian Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan	Laporan	12.00	Januari	1.00						
						Februari	1.00						
						Maret	1.00						
						April	1.00						
						Mei	1.00						
						Juni	1.00						
						Juli	1.00						
						Agustus	1.00						
						September	1.00						
						Oktober	1.00						
						November	1.00						
						Desember	1.00						

		6	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan	%	100.00	Januari		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	313,134,100	Januari	Rp	238,879
						Pebruari					Pebruari	Rp	28,134,945
						Maret					Maret	Rp	56,269,890
						April					April	Rp	84,404,835
						Mei					Mei	Rp	112,539,780
						Juni					Juni	Rp	140,674,725
						Juli					Juli	Rp	168,809,670
						Agustus					Agustus	Rp	196,944,615
						September					September	Rp	225,079,560
						Oktober			Rp	318,164,610	Oktober	Rp	253,214,505
						Nopember					Nopember	Rp	281,349,450
						Desember	100.00				Desember	Rp	318,164,610
		7	Jumlah Laporan Layanan Administrasi Perkantoran Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan	Laporan	12.00	Januari	1.00						
						Februari	1.00						
						Maret	1.00						
						April	1.00						
						Mei	1.00						
						Juni	1.00						
						Juli	1.00						
						Agustus	1.00						
						September	1.00						
						Oktober	1.00						
						November	1.00						
						Desember	1.00						
		8	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan	%	100.00	Januari		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	8,764,057,530	Januari	Rp	412,563,650
						Pebruari					Pebruari	Rp	797,043,681
						Maret					Maret	Rp	1,594,087,362
						April					April	Rp	2,603,166,274
						Mei					Mei	Rp	3,400,209,955
						Juni					Juni	Rp	4,282,892,378

						Juli				Juli	Rp	5,079,936,059		
						Agustus				Agustus	Rp	5,876,979,740		
						September				September	Rp	6,674,023,421		
						Oktober			Rp	8,310,815,565	Oktober	Rp	7,471,067,102	
						Nopember				Nopember	Rp	8,268,110,783		
						Desember	100.00			Desember	Rp	8,310,815,565		
		9	Jumlah Laporan Layanan Administrasi Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan	Laporan	12.00	Januari	1.00							
						Februari	1.00							
						Maret	1.00							
						April	1.00							
						Mei	1.00							
						Juni	1.00							
						Juli	1.00							
						Agustus	1.00							
						September	1.00							
						Oktober	1.00							
						November	1.00							
						Desember	1.00							
TOTAL ANGGARAN (Rp)											Rp	10,290,528,188	Rp	10,290,528,188
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				Keterangan		
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target		Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>ESELON IV</b>														
<b>KASUBAG UMUM</b>														
1	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	1	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Laporan	12.00	Januari	1.00						KASUBAG UMUM	
						Februari	1.00							
						Maret	1.00							
						April	1.00							
						Mei	1.00							
						Juni	1.00							
						Juli	1.00							
						Agustus	1.00							
						September	1.00							
						Oktober	1.00							
						November	1.00							



						Juli	1.00	Jumlah Surat Yang Masuk Dan Surat Yang Keluar Pada Satuan Polisi Pamong Praja
						Agustus	1.00	Jumlah Surat Yang Masuk Dan Surat Yang Keluar Pada Satuan Polisi Pamong Praja
						September	1.00	Jumlah Surat Yang Masuk Dan Surat Yang Keluar Pada Satuan Polisi Pamong Praja
						Oktober	1.00	Jumlah Surat Yang Masuk Dan Surat Yang Keluar Pada Satuan Polisi Pamong Praja
						November	1.00	Jumlah Surat Yang Masuk Dan Surat Yang Keluar Pada Satuan Polisi Pamong Praja
						Desember	1.00	Jumlah Surat Yang Masuk Dan Surat Yang Keluar Pada Satuan Polisi Pamong Praja
<b>PENYUSUN RENCANA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA</b>								
1	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dan Penelahaan Data Obyek Kerja Di Bidang Rencana Kebutuhan Sarana Dan Prasarana	1	Jumlah Laporan RKBMD Dan RKPBMMD Yang Dikelola	Laporan	2.00	Januari		
						Februari		
						Maret		
						April	1.00	RKBMD Dan RKPBMMD Induk Tahun 2024
						Mei		
						Juni	1.00	RKBMD Dan RKPBMMD Perubahan Tahun 2023
						Juli		
						Agustus		
						September		
						Oktober		
						November		
						Desember		
2	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi BMD, Rekonsiliasi Persediaan Setiap Bulan Dan Laporan BMD Semester I Dan Semester II	1	Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD, Rekonsiliasi Persediaan Setiap Bulan Dan Laporan BMD Semester I Dan Semester II	Laporan	14.00	Januari	2.00	Laporan Rekon BMD Dan Rekon Persediaan Ub. Desember 2022, Laporan BMD Tahun 2022
						Februari	1.00	Laporan Rekon BMD Dan Rekon Persediaan Ub. Januari 2023
						Maret	1.00	Laporan Rekon BMD Dan Rekon Persediaan Ub. Pebruari 2023
						April	1.00	Laporan Rekon BMD Dan Rekon Persediaan Ub. Maret 2023
						Mei	1.00	Laporan Rekon BMD Dan Rekon Persediaan Ub. April 2023
						Juni	1.00	Laporan Rekon BMD Dan Rekon Persediaan Ub. Mei 2023
						Juli	2.00	Laporan Rekon BMD Dan Rekon Persediaan Ub. Juni 2023, Laporan BMD Semester 1 Tahun 2023
						Agustus	1.00	Laporan Rekon BMD Dan Rekon Persediaan Ub. Juli 2023
						September	1.00	Laporan Rekon BMD Dan Rekon Persediaan Ub. Agustus 2023
						Oktober	1.00	Laporan Rekon BMD Dan Rekon Persediaan Ub. September 2023
						November	1.00	Laporan Rekon BMD Dan Rekon Persediaan Ub. Oktober 2023
						Desember	1.00	Laporan Rekon BMD Dan Rekon Persediaan Ub. Nopember 2023

3	Terlaksananya Pengaturan Penggunaan Sarana Dan Prasarana Untuk Pelaksanaan Kegiatan Dinas Yang Ada	1	Jumlah Laporan Penggunaan Sarana Dan Prasarana	Laporan	2.00	Januari	1.00	Kartu Inventaris Ruang (KIR Tahun 2022)
						Februari		
						Maret		
						April		
						Mei		
						Juni		
						Juli	1.00	Kartu Inventaris Ruang (KIR Semester I Tahun 2023)
						Agustus		
						September		
						Oktober		
						November		
						Desember		
<b>PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA</b>								
1	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dan Penelaahan Data Obyek Kerja Di Bidang Rencana Kebutuhan Sarana Dan Prasarana	1	Jumlah Laporan RKBMD Dan RKPBMMD Yang Dikelola	Laporan	2.00	Januari		
						Februari		
						Maret		
						April	1.00	RKBMD Dan RKPBMMD Induk Tahun 2024
						Mei		
						Juni	1.00	RKBMD Dan RKPBMMD Perubahan Tahun 2023
						Juli		
						Agustus		
						September		
						Oktober		
						November		
						Desember		
2	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi BMD, Rekonsiliasi Persediaan Setiap Bulan Dan Laporan BMD Semester I Dan Semester II	1	Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD, Rekonsiliasi Persediaan Setiap Bulan Dan Laporan BMD Semester I Dan Semester II	Laporan	14.00	Januari	2.00	Laporan Rekon BMD Dan Rekon Persediaan Ub. Desember 2022, Laporan BMD Tahun 2022
						Februari	1.00	Laporan Rekon BMD Dan Rekon Persediaan Ub. Januari 2023
						Maret	1.00	Laporan Rekon BMD Dan Rekon Persediaan Ub. Februari 2023
						April	1.00	Laporan Rekon BMD Dan Rekon Persediaan Ub. Maret 2023
						Mei	1.00	Laporan Rekon BMD Dan Rekon Persediaan Ub. April 2023
						Juni	1.00	Laporan Rekon BMD Dan Rekon Persediaan Ub. Mei 2023
						Juli	2.00	Laporan Rekon BMD Dan Rekon Persediaan Ub. Juni 2023, Laporan BMD Semester 1 Tahun 2023

						Agustus	1.00	Laporan Rekon BMD Dan Rekon Persediaan Ub. Juli 2023
						September	1.00	Laporan Rekon BMD Dan Rekon Persediaan Ub. Agustus 2023
						Oktober	1.00	Laporan Rekon BMD Dan Rekon Persediaan Ub. September 2023
						November	1.00	Laporan Rekon BMD Dan Rekon Persediaan Ub. Oktober 2023
						Desember	1.00	Laporan Rekon BMD Dan Rekon Persediaan Ub. Nopember 2023
3	Terlaksananya Pengaturan Penggunaan Sarana Dan Prasarana Untuk Pelaksanaan Kegiatan Dinas Yang Ada	1	Jumlah Laporan Penggunaan Sarana Dan Prasarana	Laporan	2.00	Januari	1.00	Kartu Inventaris Ruangan (KIR Tahun 2022)
						Februari		
						Maret		
						April		
						Mei		
						Juni		
						Juli	1.00	Kartu Inventaris Ruangan (KIR Semester I Tahun 2023)
						Agustus		
						September		
						Oktober		
						November		
						Desember		
4	Tersedianya Surat Perijinan Kendaraan Dinas Operasional SatPolPP Kab. Buleleng Sehingga Terwujudnya Tertib Administrasi Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	1	Jumlah Surat Perijinan Kendaraan Dinas Operasional SatPolPP Kab. Buleleng	Laporan	9.00	Januari	1.00	Laporan Rekap Kendaraan Dinas Yang Tersamsat
						Februari		
						Maret	1.00	Laporan Rekap Kendaraan Dinas Yang Tersamsat
						April	1.00	Laporan Rekap Kendaraan Dinas Yang Tersamsat
						Mei	1.00	Laporan Rekap Kendaraan Dinas Yang Tersamsat
						Juni	1.00	Laporan Rekap Kendaraan Dinas Yang Tersamsat
						Juli	1.00	Laporan Rekap Kendaraan Dinas Yang Tersamsat
						Agustus		
						September	1.00	Laporan Rekap Kendaraan Dinas Yang Tersamsat
						Oktober		
						November	1.00	
						Desember	1.00	
5	Tersedianya Laporan SPJ Bidang Sarana Dan Prasarana	1	Jumlah Laporan SPJ Bidang Sarana Dan Prasarana	Laporan	12.00	Januari	1.00	Laporan SPJ Bulanan
						Februari	1.00	Laporan SPJ Bulanan
						Maret	1.00	Laporan SPJ Bulanan
						April	1.00	Laporan SPJ Bulanan

						Mei	1.00	Laporan SPJ Bulanan
						Juni	1.00	Laporan SPJ Bulanan
						Juli	1.00	Laporan SPJ Bulanan
						Agustus	1.00	Laporan SPJ Bulanan
						September	1.00	Laporan SPJ Bulanan
						Oktober	1.00	Laporan SPJ Bulanan
						November	1.00	Laporan SPJ Bulanan
						Desember	1.00	Laporan SPJ Bulanan

**PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**

1	Tersedianya Dokumen Administrasi Bagian Kepegawaian	1	Jumlah Laporan Administrasi Bagian Kepegawaian	Laporan	12.00	Januari	1.00	Laporan Berkala, Ujian Dinas, Kenaikan Pangkat, Pensiun Dan Laporan Yang Berkaitan Dengan Kepegawaian
						Februari	1.00	Laporan Berkala, Ujian Dinas, Kenaikan Pangkat, Pensiun Dan Laporan Yang Berkaitan Dengan Kepegawaian
						Maret	1.00	Laporan Berkala, Ujian Dinas, Kenaikan Pangkat, Pensiun Dan Laporan Yang Berkaitan Dengan Kepegawaian
						April	1.00	Laporan Berkala, Ujian Dinas, Kenaikan Pangkat, Pensiun Dan Laporan Yang Berkaitan Dengan Kepegawaian
						Mei	1.00	Laporan Berkala, Ujian Dinas, Kenaikan Pangkat, Pensiun Dan Laporan Yang Berkaitan Dengan Kepegawaian
						Juni	1.00	Laporan Berkala, Ujian Dinas, Kenaikan Pangkat, Pensiun Dan Laporan Yang Berkaitan Dengan Kepegawaian
						Juli	1.00	Laporan Berkala, Ujian Dinas, Kenaikan Pangkat, Pensiun Dan Laporan Yang Berkaitan Dengan Kepegawaian
						Agustus	1.00	Laporan Berkala, Ujian Dinas, Kenaikan Pangkat, Pensiun Dan Laporan Yang Berkaitan Dengan Kepegawaian
						September	1.00	Laporan Berkala, Ujian Dinas, Kenaikan Pangkat, Pensiun Dan Laporan Yang Berkaitan Dengan Kepegawaian
						Oktober	1.00	Laporan Berkala, Ujian Dinas, Kenaikan Pangkat, Pensiun Dan Laporan Yang Berkaitan Dengan Kepegawaian
						November	1.00	Laporan Berkala, Ujian Dinas, Kenaikan Pangkat, Pensiun Dan Laporan Yang Berkaitan Dengan Kepegawaian
						Desember	1.00	Laporan Berkala, Ujian Dinas, Kenaikan Pangkat, Pensiun Dan Laporan Yang Berkaitan Dengan Kepegawaian

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Keterangan
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target		Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**ESELON IV**

**KASUBAG KEUANGAN**

1	Tersedianya Pengelolaan dan Pengadministrasian Keuangan	1	Jumlah Laporan Pengadministrasian Keuangan	Laporan	12.00	Januari	1.00					KASUBAG KEUANGAN
						Februari	1.00					
						Maret	1.00					
						April	1.00					
						Mei	1.00					
						Juni	1.00					
						Juli	1.00					
						Agustus	1.00					
						September	1.00					
						Oktober	1.00					



						Juli	1.00	Laporan SPJ Fungsional, Laporan LPJ, Laporan BKU, Rekening Koran, TBP (Tanda Bukti Pembayaran) melalui aplikasi SIPD maupun manual, Laporan RTH (Realisasi Transaksi Harian), Laporan Rekon Pajak Bulanan Register/mencatat penomoran GU/LS, SPP dan SPM dan Pajak
						Agustus	1.00	Laporan SPJ Fungsional, Laporan LPJ, Laporan BKU, Rekening Koran, TBP (Tanda Bukti Pembayaran) melalui aplikasi SIPD maupun manual, Laporan RTH (Realisasi Transaksi Harian), Laporan Rekon Pajak Bulanan Register/mencatat penomoran GU/LS, SPP dan SPM dan Pajak
						September	1.00	Laporan SPJ Fungsional, Laporan LPJ, Laporan BKU, Rekening Koran, TBP (Tanda Bukti Pembayaran) melalui aplikasi SIPD maupun manual, Laporan RTH (Realisasi Transaksi Harian), Laporan Rekon Pajak Bulanan Register/mencatat penomoran GU/LS, SPP dan SPM dan Pajak
						Oktober	1.00	Laporan SPJ Fungsional, Laporan LPJ, Laporan BKU, Rekening Koran, TBP (Tanda Bukti Pembayaran) melalui aplikasi SIPD maupun manual, Laporan RTH (Realisasi Transaksi Harian), Laporan Rekon Pajak Bulanan Register/mencatat penomoran GU/LS, SPP dan SPM dan Pajak
						November	1.00	Laporan SPJ Fungsional, Laporan LPJ, Laporan BKU, Rekening Koran, TBP (Tanda Bukti Pembayaran) melalui aplikasi SIPD maupun manual, Laporan RTH (Realisasi Transaksi Harian), Laporan Rekon Pajak Bulanan Register/mencatat penomoran GU/LS, SPP dan SPM dan Pajak
						Desember	1.00	Laporan SPJ Fungsional, Laporan LPJ, Laporan BKU, Rekening Koran, TBP (Tanda Bukti Pembayaran) melalui aplikasi SIPD maupun manual, Laporan RTH (Realisasi Transaksi Harian), Laporan Rekon Pajak Bulanan Register/mencatat penomoran GU/LS, SPP dan SPM dan Pajak
2	Tersedianya Rencana Pengawasan Perda Dan Perkada (Bupati)	2	Jumlah Laporan Dan Data Pengawasan Perda Dan Perkada (Bupati)	Laporan	6.00	Januari	1.00	Laporan Dan Data Pengawasan Perda Dan Perkada (Bupati)
						Februari	1.00	Laporan Dan Data Pengawasan Perda Dan Perkada (Bupati)
						Maret	1.00	Laporan Dan Data Pengawasan Perda Dan Perkada (Bupati)
						April	1.00	Laporan Dan Data Pengawasan Perda Dan Perkada (Bupati)
						Mei	1.00	Laporan Dan Data Pengawasan Perda Dan Perkada (Bupati)
						Juni	1.00	Laporan Dan Data Pengawasan Perda Dan Perkada (Bupati)
						Juli		
						Agustus		
						September		
						Oktober		
						November		
						Desember		
<b>PENGADMINISTRASI KEUANGAN</b>								
1	Terlaksananya Administrasi Keuangan		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Laporan	12.00	Januari	1.00	Laporan Bukti Ebilling Pajak Masa melalui Efiling, Laporan Pajak Bulanan dan Tahunan PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN melalui Ebuport, Laporan Administrasi SPP atas pengajuan, Laporan Administrasi Surat Perintah membayar dalam SIPD, Laporan Administrasi Pencatatan/Register SPJ GU, LS, SP2D, SPP, SPM dan Bukti Pajak, Laporan BKU, Laporan Administrasi Tanda Bukti Pembayaran melalui aplikasi SIPD, Laporan Data Penginputan Pajak, Laporan SPJ GU, LS dan TPP, Laporan Administrasi Penginputan Penghasilan PNS, Laporan Bukti Ebilling Jaminan BPJS Kesehatan dan Jaminan BPJS Tenaga Kerja



						Oktober	1.00	Laporan Bukti Ebiling Pajak Masa melalui Efiling, Laporan Pajak Bulanan dan Tahunan PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN melalui Ebuport, Laporan Administrasi SPP atas pengajuan, Laporan Administrasi Surat Perintah membayar dalam SIPD, Laporan Administrasi Pencatatan/Register SPJ GU, LS, SP2D, SPP, SPM dan Bukti Pajak, Laporan BKU, Laporan Administrasi Tanda Bukti Pembayaran melalui aplikasi SIPD, Laporan Data Penginputan Pajak, Laporan SPJ GU, LS dan TPP, Laporan Administrasi Penginputan Penghasilan PNS, Laporan Bukti Ebiling Jaminan BPJS Kesehatan dan Jaminan BPJS Tenaga Kerja				
						November	1.00	Laporan Bukti Ebiling Pajak Masa melalui Efiling, Laporan Pajak Bulanan dan Tahunan PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN melalui Ebuport, Laporan Administrasi SPP atas pengajuan, Laporan Administrasi Surat Perintah membayar dalam SIPD, Laporan Administrasi Pencatatan/Register SPJ GU, LS, SP2D, SPP, SPM dan Bukti Pajak, Laporan BKU, Laporan Administrasi Tanda Bukti Pembayaran melalui aplikasi SIPD, Laporan Data Penginputan Pajak, Laporan SPJ GU, LS dan TPP, Laporan Administrasi Penginputan Penghasilan PNS, Laporan Bukti Ebiling Jaminan BPJS Kesehatan dan Jaminan BPJS Tenaga Kerja				
						Desember	1.00	Laporan Bukti Ebiling Pajak Masa melalui Efiling, Laporan Pajak Bulanan dan Tahunan PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN melalui Ebuport, Laporan Administrasi SPP atas pengajuan, Laporan Administrasi Surat Perintah membayar dalam SIPD, Laporan Administrasi Pencatatan/Register SPJ GU, LS, SP2D, SPP, SPM dan Bukti Pajak, Laporan BKU, Laporan Administrasi Tanda Bukti Pembayaran melalui aplikasi SIPD, Laporan Data Penginputan Pajak, Laporan SPJ GU, LS dan TPP, Laporan Administrasi Penginputan Penghasilan PNS, Laporan Bukti Ebiling Jaminan BPJS Kesehatan dan Jaminan BPJS Tenaga Kerja				
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			Keterangan	
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target		Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>ESELON IV</b>												
<b>KASUBAG PERENCANAAN</b>												
1	Tertaksananya Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	1	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Laporan	12.00	Januari	1.00					KASUBAG PERENCANAAN
						Pebruari	1.00					
						Maret	1.00					
						April	1.00					
						Mei	1.00					
						Juni	1.00					
						Juli	1.00					
						Agustus	1.00					
						September	1.00					
						Oktober	1.00					
						Nopember	1.00					
						Desember	1.00					
2	Tersedianyan Laporan Evaluasi capaian dan ikhtisar Kinerja Perangkat Daerah	1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar evaluasi Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12.00	Januari	1.00					KASUBAG PERENCANAAN
						Pebruari	1.00					



2	Tersedianya SPJ Bagian Perencanaan dan Program	1	Jumlah SPJ Bidang Perencanaan dan Program	Laporan	12.00	Januari	1.00	SPJ Pengadminstrasian Dan Belanja Sub Bagian Perencanaan
						Februari	1.00	SPJ Pengadminstrasian Dan Belanja Sub Bagian Perencanaan
						Maret	1.00	SPJ Pengadminstrasian Dan Belanja Sub Bagian Perencanaan
						April	1.00	SPJ Pengadminstrasian Dan Belanja Sub Bagian Perencanaan
						Mei	1.00	SPJ Pengadminstrasian Dan Belanja Sub Bagian Perencanaan
						Juni	1.00	SPJ Pengadminstrasian Dan Belanja Sub Bagian Perencanaan
						Juli	1.00	SPJ Pengadminstrasian Dan Belanja Sub Bagian Perencanaan
						Agustus	1.00	SPJ Pengadminstrasian Dan Belanja Sub Bagian Perencanaan
						September	1.00	SPJ Pengadminstrasian Dan Belanja Sub Bagian Perencanaan
						Oktober	1.00	SPJ Pengadminstrasian Dan Belanja Sub Bagian Perencanaan
						November	1.00	SPJ Pengadminstrasian Dan Belanja Sub Bagian Perencanaan
						Desember	1.00	SPJ Pengadminstrasian Dan Belanja Sub Bagian Perencanaan

Singaraja, 26 Oktober 2023  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Buleleng,



**Gede Anja Suardana, AP.MM**  
Perbina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19740323 199311 1 001